

POLRES BERSAMA FORUM PEWARTA BANTUL
Pupuk Kepedulian, Berbagi Takjil



KR-Judiman

Polres Bantul berkolaborasi dengan FPB bagi-bagi takjil.

BANTUL (KR) - Jajaran Kepolisian Resor Bantul, bersama Forum Pewarta Bantul (FPB) memupuk kepedulian kepada sesama di bulan Ramadan dengan membagikan takjil jelang buka puasa, Kamis (13/3). Kegiatan yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman Bantul ini, dihadiri langsung Kapolres Bantul, AKBP Novita Eka Sari dan para anggota Forum Pewarta Bantul .

AKBP Novita mengatakan, apa yang dilakukan bersama para pewarta ini tidak lepas dari upaya menjalin sinergitas dan kemitraan di antara kedua belah pihak.

“Kami ingin terus menjalin sinergitas dan kemitraan antara polisi dan pewarta atau wartawan. Salah satunya melalui kepedulian pada sesama yang diwujudkan dalam bentuk pembagian takjil,” ujarnya.

Kegiatan berbagi ini bukan hanya sekadar berbagi makanan, namun bentuk kebersamaan guna mempererat tali silaturahmi antara Polri, me-

dia, dan masyarakat. Novita juga berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh kebaikan bagi banyak pihak.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli dan saling membantu, terutama pada bulan yang penuh rahmat ini,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua FPB, Sukro Riyadi mengatakan, langkah Polres Bantul menggugah kepedulian bersama jurnalis patut diapresiasi.

“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolres Bantul dan jajarannya yang telah membangun kolaborasi pembagian takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Bantul,” ujar Sukro.

Tidak kalah penting dalam kegiatan tersebut ialah bagian dari upaya menanamkan spirit berbagi dan peduli terhadap sesama di bulan Ramadan tahun ini.

“Semoga dengan kegiatan ini, kita semua dapat semakin dekat dan saling mendukung,” harapnya. **(Jdm)-f**

TERSANDUNG KASUS PENGADAAN TANAH

Mantan Kepala UPT- BPMRP Yogya Dieksekusi

BANTUL (KR) - Drs Aristo (60) warga Karangbendo Banguntapan Bantul dieksekusi Tim Kejaksaan Negeri Bantul setelah kasasinya ditolak MA (sesuai putusan MA - 7755 K/ Pidsus/ 2024 tanggal 16 Desember 2024) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Yogyakarta pada tahun 2012. Kini tersangka menghuni Rumah Tahanan Tipikor di Yogyakarta.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bantul , Gunto-ro Jangkung Wisnu SH MH, Kamis (13/3), pada tahun 2012 tersangka Drs Aristo, selaku kepala Unit Pelaksana Teknis - Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (UPT - BPMRP) Yogyakarta mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor BP-MRP Yogyakarta dan pada tahun anggaran 2013 BP-MRP Yogyakarta melalui Kemendikbud RI mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah (belanja modal tanah) yang pagunya Rp 8.505.000.000. Tetapi pada mata anggaran

1991.998 (gedung / bangunan) senilai Rp 8.762.910.000, masih diblokir diberi tanda bintang, belum ada data pendukung terkait lainnya karena adanya kebijakan moratorium.

Untuk membuka blokir tersebut, Kepala Kantor BPMRP Yogyakarta (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan untuk membuat Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Data Dukung Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung BPMRP Yogyakarta tahun anggaran 2013, dimana di dalamnya dilengkapi data dukung calon tanah yang dibebaskan dan diberi gan-

ti rugi, yakni tanah milik Indah Lilyawati terdiri atas dua sertifikat.

Selanjutnya TOR, RAB dan data dukung disetujui oleh Dirjen Anggaran, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata pengadaan tanah untuk pembangunan gedung BPMRP Yogyakarta bukan obyek tanah yang bukti dukungannya, melainkan obyek tanah yang dibebaskan adalah tanah seluas 8.191 M2 yang terletak di dusun Dayakan Purwomartani Kalasan Sleman.

Selanjutnya tanah di dusun Dayakan yang sudah diberi ganti rugi disertai pelepasan hak tersebut tidak dapat didaftarkan dan



KR-Kejari Bantul

Terdakwa Aristo (rompi orange) dieksekusi Tim Kejari Bantul.

disertifikatkan menjadi atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena tanah tersebut ternyata diblokir berdasarkan Putusan PK MA RI Nomor 33 PK/ Pdt/2012 tanggal 24 Juni 2013.

Akibat dari penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara berupa uang ganti rugi kepada tersangka Nanik Sulistiati sebesar Rp 5.641.551.250 (telah dieksekusi sebelumnya)

Berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B- 4646/M.4.12/-Ft.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan: Primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang- undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(Jdm)-f**

Jangan Abaikan Keamanan dan Kehalalan Pangan

yang lebih dikenal dengan istilah halalan thayyiban.

“Keduanya tidak hanya memberikan perlindungan

kepada konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga kesehatan masyarakat dan



KR - Istimewa

Masyarakat Singosaren setelah mendapatkan Penyuluhan Keamanan dan Kehalalan Pangan.

memperkuat daya saing bisnis UMKM,” kata Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Dr agr Ir Adhita Sri Prabakusuma SP MSc IPM, Jumat (14/3).

Dosen UAD Adhita Sri Prabukusuma (Vokasi Bisnis Jasa Makanan/Bisma Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB) bersama Retnosyari Septiyani STP MSc (Prodi Vokasi Bisma) dan Dr Sunarti SKM MSi (Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat/FKM) melaksanakan PKM Internal

Monotahun UAD bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Bantul. Program tersebut fokus ‘Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Kehalalan Produk UMKM melalui Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CP-POB) dan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Menurut Adhita Sri Prabukusuma, sangat penting menjaga makanan yang dikonsumsi sehari-hari selalu aman serta terjamin kehalalannya. **(Jay)-f**

HUKUM

POLDA JANJI TAK TUTUPI KASUS
Polisi Cekik Balita Hingga Tewas

SEMARANG(KR)- Polda Jateng berjanji tidak akan menutup-nutupi kasus penganiayaan merenggut nyawa NA, seorang bayi lelaki berusia 2 bulan. Korban diduga dianiaya dengan cara dicekik oknum polisi Brigadir AK, anggota Intel Polda Jateng.

“Kami dalam penanganan kasus penganiayaan hingga korban bayi 2 bulan meninggal diduga melibatkan anggota Polda Jateng akan bekerja secara profesional dan transparan”, ungkap Kabid Humas Polda Jateng usai acara berbuka puasa Polda Jateng bersama wartawan, Kamis (13/3) di Mapolda, Jalan Pahlawan Semarang. .

Bahkan, dalam proses penyidikan, menurut Kabid Humas bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini guna memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dalam memberikan keterangan selama proses penyidikan. “Kami telah berkoordinasi dengan LPSK untuk menjamin keselamatan para saksi, Ini adalah langkah

konkret dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tanpa intimidasi,” tegasnya.

Peristiwa tragis menimpa NA, bayi lelaki berusia dua bulan anak DJ , seperti yang diberitakan terjadi pada Minggu (2/3) . Awalnya, Brigadir AK bersama teman wanitanya, DJ pergi dalam satu mobil. DJ pergi mengajak anak lelakinya yang baru berusia 2 bulan. Kemudian, DJ mampir belanja di Pasar Peteronga Semarang. DJ belanja sendirian, sementara anaknya sesuai permintaan ibunya ditunggui Brigadir AK di dalam mobil.

Usai berbelanja, DJ kembali ke mobil melihat kondisi anaknya dalam keadaan tidak wajar dan dibawa ke rumah sakit. Namun setelah perawatan NA dinyatakan meninggal dunia.

Sang ibu DJ atas kematian anaknya yang tidak wajar tidak terima. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan pada tanggal 5 Maret 2025. Atas laporan tersebut, kemudian terlapor diamanakan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam serta di Proses Pidana oleh Dit Reskrimum Polda Jateng. **(Cry)-f**

BBM DIJUAL KE INDUSTRI

Penimbun Solar Bersubsidi Digerebek

REMBANG (KR) - Sebuah kelompok usaha ilegal di pertengahan bulan Ramadan ini harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sebuah gudang di tengah pemukiman warga, tepatnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Kota Rembang, Kab Rembang digerebek satuan reserse kriminal karena dugaan melakukan penimbunan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi.

Aparat keamanan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 7.000 liter solar bersubsidi yang dibeli dari berbagai SPBU di kawasan pantura.

Keterangan yang dihimpun KR, Kamis (13/3) menyebutkan, bermula dari laporan masyarakat ke pihak intelkam tentang dugaan terjadinya penimbunan BBM jenis solar bersubsidi yang akhirnya dijual ke perusahaan menjadi solar non subsidi. Tidak main-main aparat yang turun ke Rembang dari Tim Satgas Gakkum tindak pidana tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri yang diperkuat

satuan reskrim Polres Rembang. Tim dipimpin komandan Satgas. Kopol Widiar Fernandes SH.

Tersangka utama yang bertindak sebagai bos R (40) hari itu juga berhasil diamankan dan langsung digelandang ke Mapolres Rembang guna dilakukan serangkaian pemeriksaan. Ditengarai aksi yang dilakukan oleh R dengan membeli solar bersubsidi di berbagai SPBU dengan mobil truk yang sudah dimodifikasi. Sedikitnya 3 buah truk tangki, 10 drum untuk tandon BBM solar, mesin pompa sekaligus 7.000 liter solar berada di gudang sumberejo, Rembang dengan label PT Multi Niaga Energi.

Komandan Satgas Gakkum Kopol W Fernandes kepada wartawan Kamis kemarin mengakui, jika tindakan pembelian BBM solar bersubsidi yang kemudian dijual ke perbaragai perusahaan dengan BBM Solar non subsidi berhasil mengeruk keuntungan yang tidak sedikit. **(Ags)-f**

OKNUM SEKDES DI REMBANG MASUK BUI

Gunakan Dana Desa untuk Judol

REMBANG (KR) - Seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di wilayah Kabupaten Rembang harus mendekam di terali besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kegemarannya bermain judi online (judol).

Af (40) dengan jabatan Sekdes di Desa Tanjung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, kemarin dijemput paksa oleh aparat Kejaksaan Negeri Rembang dibantu aparat Kepolisian, setelah yang bersangkutan mangkir hingga tiga kali saat dipanggil oleh Kejari setempat.

Keterangan yang berhasil dihimpun KR Jumat (14/3) menyebutkan, jika

dugaan korupsi Dana Desa (DD) semula mengarah kepada Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Sulang Muh (42). Namun setelah dilakukan pendalaman kasus pembobolan uang DD itu ternyata dugaan kuat mengarah kepada oknum Sekdes Af. Kades Muh, serta beberapa perangkat desa setempat, termasuk Camat Sulang, Arif Dwi Sulis juga sudah diminta kete-

rangannya oleh Kejaksaan negeri setempat.

“Karena mangkir dari surat panggilan hingga tiga kali maka terpaksa diadakan jemput paksa. Seemantara data yang kami peroleh sebesar Rp 400 juta dana desa yang ditilep oknum Sekdes,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Rembang I Wayan Eka saat diminta keterangannya, Jumat kemarin.

SENGKETA TANAH WARISAN

BPN Karanganyar Dituding Terbitkan Sertipikat Ganda



KR-Abdul Alim

Stefani Tania Hartana bersama kuasa hukumnya, di kantor BPN ATR Karanganyar

rangmalang. Lantaran utang tak tertagih, lalu dilelang dan dibeli oleh Eko Suprihono pada tahun 2019. “Jadi waktu digadaikan ke pak Eko ke BPR BKK Karangmalang, hingga sampai dilelang 5 Maret 2025 tidak selesai,” ucap Kuasa Hukum Stephanie Tania Hartana, Slamet Riyadi, Kamis (13/3).

Slamet mengatakan telah menyurati hingga mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KP-KNL) untuk menyampaikan pembatalan lelang

dengan alasan sertipikat itu terdiri dari lahan milik Stephanie.

Selain itu, ia juga sudah melaporkan Eko Suprihono ke Polres Karanganyar dengan dugaan pemalsuan dokumen, Februari 2025. Hal itu dilandasi keterangan pihak Pemerintah Desa Baturan yang tak mengakui Eko pemilik tanah itu. “Kami sudah melaporkan ke Polres Karanganyar, Awal Maret, klien saya sudah dipanggil dan dimintai keterangan,” ucap dia

Ia menyesalkan kantor

BPN menerbitkan sertipikat untuk Eko pada 2019. Seharusnya itu tak dilakukan mengingat ada komplain mengenai kepemilikan bidang tanah itu. “Tuntutan kami dilakukan pembatalan sertipikat dengan nomor itu oleh BPN ATR Karanganyar,” pungkas dia.

Ia juga merasa geram saat mengetahui bidang tanah itu kini berdiri bangunan permanen.

Staf Bagian Pengendalian Sengketa BPN ATR Kabupaten Karanganyar Agung Mahdi mengatakan sudah menerima surat itu dan akan ditindaklanjuti.

“Kita di sini pelayanan apapun keluhan dari warga baik masyarakat , badan hukum maupun kelompok kami persilahkan. Surat masuk kami tindaklanjuti, dan menunggu diposisi. Prinsipnya jika ada landasan administratif lengkap, kita catat sesuai aturan berlaku. Kebenaran formil di tingkat pengadilan,” singkat dia. **(Lim)-f**